



# Asah Asuh

Membangun Karakter dan Budaya Bangsa

EDISI 03 • TAHUN VI • MARET 2015

- ▶ Perkuat Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan Lewat Kerangka Strategis
- ▶ Perluasan Akses Pendidik Bagi Masyarakat Terpinggirkan
- ▶ Tingkatkan Mutu Pendidik Sesuai Lingkup Standar Nasional Pendidikan



**WAPRES JUSUF KALLA:**

# Pendidikan Harus Melihat ke Depan

## BERANDA

**Wapres Jusuf Kalla:**  
Pendidikan Harus Melihat ke Depan ..... 3

## LAPORAN UTAMA

### REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2015:

Kemendikbud Hadirkan Fasilitas Konsultasi dan Layanan di RNP 2015 ..... 4

Perkuat Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan Lewat Kerangka Strategis ..... 5

Perluas Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Terpinggirkan ... 6

Tingkatkan Mutu Pendidikan Sesuai Lingkup Standar Nasional Pendidikan ..... 7

UU 23/2014 Atur Pembagian Tugas Pusat dan Daerah ..... 8

## LIPUTAN KHUSUS

### LEIPZIG BOOK FAIR 2015:

Indonesia Tampilkan Berbagai Acara Sastra dan Seni ..... 9

Indonesia Tandatangani Kontrak Penerjemahan dengan Penerbit Jerman ..... 10

Publik dan Media Jerman Soroti Indonesia ..... 11

## PERISTIWA

Sambut HFN, 60 Mobil Bioskop Keliling ke Daerah ..... 12

Dua Perupa Indonesia Pamerkan Karyanya di Pameran "Merging Metaphors" ..... 12

Mendikbud Terima Kedatangan 20 Pelajar Jepang ..... 13

PAUD, Landasan Utama Tapaki Jenjang Kehidupan Berikutnya ..... 13

Ibu Negara, Iriana Joko Widodo Dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Indonesia ..... 14

Testimoni Peserta Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan 2015 ..... 15

Galeri Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan 2015 ... 16

# RNP 2015 Siap Terjemahkan Nawa Cita Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

**Jakarta, Kemendikbud** - Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNP 2015) adalah rembuk nasional yang pertama kali diselenggarakan dalam pemerintahan Kabinet Kerja. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan rembuk nasional ini memiliki arti yang sangat strategis karena merupakan satu pertemuan untuk mengatur langkah bersama, menata barisan agar rapi dalam menerjemahkan, dan melaksanakan Nawa Cita revolusi mental, serta implementasi atas RPJMN.

"Rembuk Nasional ini diikuti 916 peserta antara lain pejabat Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota, UPT, Atase pendidikan dan kebudayaan, Komisi X DPR RI, dan stakeholder lainnya," kata Mendikbud di Pusbangtendik Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, Senin (30/03/2015).

Dalam laporannya di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mendikbud menjelaskan RNP 2015 mengambil tema "Memperkuat Pelaku dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan dan Berkarakter Dilandasi Semangat Gotong Royong". Dalam pertemuan ini, peserta akan dibagi menjadi tujuh komisi dengan pembahasan yang berbeda-beda.

Komisi I membahas tentang pendidikan anak usia dini (PAUD), Komisi II tentang Program Indonesia Pintar (PIP), Komisi III tentang penguatan kompetensi guru dan kesejahteraan guru, Komisi IV tentang Kurikulum, Buku, dan Implementasi Perubahan Ujian Nasional 2015, Komisi V tentang Pengembangan dan Perlindungan Bahasa, Komisi VI tentang Penguatan Tata Kelola, Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik, dan Komisi VII tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya.

Mendikbud juga menguraikan empat langkah yang akan dilaksanakan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, yaitu Konsolidasi Rencana, Konsolidasi Organisasi, Menyusun Program Prioritas dan Melaksanakan Arahan Khusus. Terkait Konsolidasi Rencana, Mendikbud mengajak pemerintah daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat untuk konsentrasi dalam menguatkan aktor pendidikan, yaitu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan orang tua.

Untuk Konsolidasi Organisasi, Mendikbud mengatakan tata kelola dan struktur organisasi Kemendikbud yang baru juga telah rampung pembahasannya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), sehingga Kemendikbud mulai bulan April ini siap melakukan implementasi atas rencana-rencana dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dalam menyusun program prioritas, lanjutnya, Kemendikbud telah menetapkan lima program prioritas. Pertama, perubahan pengembangan ujian nasional sebagai sebuah assessment, salah satunya ujian nasional berbasis komputer atau Computer Based Test (CBT). Program prioritas kedua masih mengenai ujian nasional, yaitu kampanye kejujuran. "Ujian nasional kali ini harus jadi ujian kejujuran bagi siswa, sekolah dan pengelola pendidikan di kabupaten dan provinsi. Ujian nasional harus dihormati sebagai suatu proses integritas," tuturnya.

Program prioritas ketiga adalah pengembangan kurikulum. Mendikbud mengatakan akan meneruskan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2013, dengan melakukan evaluasi. Tahun ini evaluasi Kurikulum 2013 diselesaikan dan ada sekolah rintisan yang akan menjadi contoh pengembangan kurikulum.

Program prioritas keempat adalah memperbaiki tata kelola guru. Mendikbud telah mengeluarkan Permendikbud tentang jam mengajar guru. Hal itu dilakukannya agar guru bisa benar-benar memainkan peran, tidak hanya di ruang kelas tapi juga di luar ruang kelas. "Dan agar bisa menjadi teladan dalam ekosistem pendidikan, ujar Mendikbud. (Lian)



**Desain Perwajahan & Tata Letak:**  
Susilo Widji Priyanto

**Fotografer:**  
Ridwan Maulana

**Keterangan Foto:**  
Wapres Jusuf Kalla, didampingi Mendikbud, Anies Baswedan, melakukan pemukulan gong, tanda dibukanya acara Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 (30/03). Acara berlangsung dari tanggal 29-31 Maret 2015 bertempat di Pusbangtendik Pendidikan dan Kebudayaan, Bojongsari, Depok, Jawa Barat.

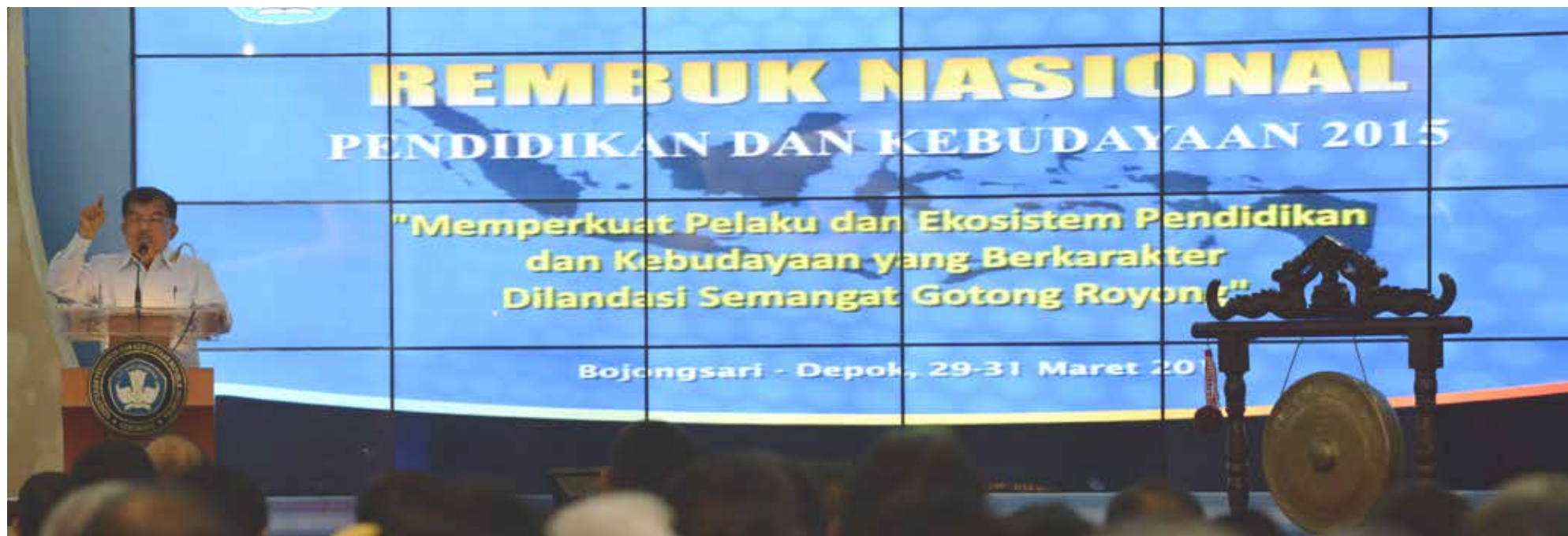


FOTO: RIDWAN M P H

## Wapres Jusuf Kalla: Pendidikan Harus Melihat ke Depan

**Pendidikan merupakan fondasi dari semua lini pembangunan. Untuk memajukan pendidikan, harus didasari dengan nilai dan cara berpikir manusianya. Demikian disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPBK), di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Depok, Jawa Barat, Senin (30/03/2015).**

**W**apres mengatakan, setiap manusia harus menyadari bahwa prinsip pendidikan adalah melihat ke depan. Untuk mengukur berhasil atau tidaknya sebuah sistem pendidikan tentu tidak bisa dilihat secara instan. Wapres mengatakan, apa yang diajarkan oleh sistem pendidikan saat ini baru akan terlihat mutunya sepuluh tahun ke depan. "Itulah kenapa pendidikan itu selalu bersifat ke depan," katanya.

Ia mencontohkan, apa yang diajarkan di kelas 3 SMP sekarang baru akan terlihat berguna atau tidak satu dekade mendatang. Kondisi tersebut inilah yang menjadi pembeda antara konsep museum dan konsep pendidikan. "Kalau museum itu untuk melihat ke belakang, sedangkan pendidikan harus melihat ke depan," ujarnya.

Wapres menggarisbawahi, jika berbicara tentang mutu pendidikan maka korelasinya dengan mutu manusia. Mewujudkan manusia yang bermutu memang tidak mudah karena tidak bersifat fisik. Sejalan dengan tema RNPBK 2015, Wapres menekankan agar pembangunan pendidikan difokuskan pada penguatan aktor pendidikan. "Aktor pendidikan itu semua, adalah guru, siswa, pengawas, kepala dinas, rektor, maupun kementerian," katanya.

Pentingnya pembangunan manusia dalam membangun pendidikan dapat mem-

perkuat kemajuan di segala sisi. Wapres JK mencontohkan, kemajuan teknologi seiring dengan majunya pendidikan. Teknologi yang bersifat membuat perubahan, selalu berubah 100 persen setiap 18 bulan. Dengan kemajuan yang sangat pesat tersebut, maka pendidikan harusnya dapat mengimbangi agar tidak tertinggal.

Menyikapi pentingnya aktor pendidikan, Wapres JK menyoroti tentang keberadaan guru. Ia menekankan agar guru bisa menjadi profesi yang terhormat. Bukan sekadar jalan pintas untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. "Guru jangan jadi profesi sampingan," tuturnya.

Dari sisi lain, Wapres juga mengatakan pendidikan harus bermanfaat untuk semua pihak, mulai dari siswa, orang tuanya, bangsa dan negaranya. Dengan penduduk yang sangat besar, 260 juta jiwa, masalah kehidupan ke depan hanya bisa diatasi dengan tiga pilihan yaitu memanfaatkan sumber daya alam, manufacturing dan jasa. Tapi karena sebaran penduduknya tidak merata, maka pendidikan harus melihat kebutuhan setiap daerah. Apakah lebih dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam, sektor industri, atau jasanya.

Salah satu metode yang menjawab tantangan demografi tersebut adalah keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Wapres mengatakan, ketika merancang

sistem pendidikan harus disadari kebutuhan akan tenaga-tenaga terampil yang bisa menjadi tenaga kerja terdidik. Tidak semua lulusan pendidikan menengah akan masuk perguruan tinggi. "Itu dasarnya mengapa kita butuh sekolah yang mencetak tenaga kerja. Kita butuh SMK," tuturnya.

Untuk menjalankan SMK berkualitas juga diperlukan guru berkualitas sebagai aktor penting. Wapres mengatakan, guru SMK juga harus disiapkan mulai dari sekarang. Karena kalau tidak, alih mencetak tenaga kerja melalui sekolah, malah akan menjadi pabrik pengangguran. Tidak hanya keprihatinan terhadap kualitas tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja berkualitas juga dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Sebagai negara besar, harusnya Indonesia bisa menghasilkan sendiri kebutuhan di dalam negeri. Tapi karena produktivitas yang masih rendah, maka bahan baku kebutuhan masyarakat masih impor.

Wapres menggarisbawahi, produktivitas juga harus didukung dengan pemerataan kualitas. Meskipun Indonesia memiliki wilayah yang luas, serta sebaran penduduk yang tidak merata, namun nilai manusia di setiap wilayah harus sama. Tanpa mengintervensi otonomi daerah, kualitas dari Sabang sampai Merauke harus sama. "Anak di Jawa, sistem dan nilainya harus sama dengan anak di Ambon, Papua, dan

Sumatera," katanya.

### Belajar, Belajar, Belajar!

Keberadaan UN selama ini masih menjadi momok bagi sebagian orang. UN dianggap sebagai pemicu stres pada siswa. Wapres JK menekankan, jika sebuah bangsa ingin berhasil maka kerja keras adalah hal mutlak. Jika ada yang menganggap bahwa UN adalah pemicu stres dan rasa cemas maka bisa dipastikan bahwa orang tersebut bukan pekerja keras. "Berarti dia tidak mau belajar," tuturnya.

Wapres mengajak agar pelaku pendidikan tidak menjadikan UN sebagai beban, karena kelulusan 100 persen bukanlah target utama. Jika budaya "mendongkrak" kelulusan siswa tidak dihapuskan, kata dia, maka yang terjadi adalah pembodohan nasional.

Syarat utama untuk mendapatkan UN kredibel adalah disiplin. Tidak ada keinginan untuk berbuat curang dengan budaya sontek menyontek. Wapres yakin, jika pelaksanaan ujian dilakukan dengan tertib, maka tidak ada lagi kenakalan remaja. "Tapi kalau melemah lagi (tidak disiplin) maka pengangguran akan naik lagi. Lebih stres ikut UN atau jadi pengangguran?," katanya.

Agar tidak terjebak dalam masalah stres dan pembodohan nasional, Wapres menyarankan agar seluruh pelaku pendidikan untuk terus belajar, belajar, dan belajar!. (Aline)

# Kemendikbud Hadirkan Fasilitas Konsultasi dan Layanan di RNPk 2015



Mendikbud bersama pejabat eselon I dan II Kemendikbud saat rapat persiapan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2015.

**Agenda tahunan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPk) kembali diselenggarakan di 2015. Forum penting yang mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan ini diselenggarakan pada 29-31 Maret 2015, di Pusat Pengembangan Tenaga Pendidikan (Pusbangtendik) Sawangan, Depok, Jawa Barat.**

**P**elaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPk) yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kali ini akan disediakan konter konsultasi dari masing-masing unit utama Kemendikbud yang diperuntukkan bagi peserta rembuknas, baik dari pusat maupun dinas-dinas di daerah. Konter ini dimaksudkan untuk memfasilitasi peserta Rembuknas menyampaikan permasalahannya.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im yang juga Ketua Pelaksana RNPk 2015 mengatakan masing-masing perwakilan atau dinas-dinas di daerah dapat menyampaikan permasalahannya melalui rapat komisi. Selain itu, kata dia, akan disediakan fasilitas layanan untuk me-

nampung permasalahan yang disampaikan oleh daerah atau dinas tersebut. "Kita sediakan meja-meja untuk menampung permasalahan, seperti pusat layanan, sesuai bidangnya masing-masing," katanya pada saat diwawancarai di lokasi pelaksanaan RNPk, Depok, Minggu (29/3/2015)

Ainun menyampaikan, konter konsultasi tersebut ada di hari kedua dan ketiga pelaksanaan RNPk tanggal 30-31 Maret 2015. Dia mengatakan, akan ada tim dari masing-masing unit utama untuk memberikan konsultasi langsung dengan perwakilan daerah atau dinas tersebut.

Ainun mengungkapkan, selain berkonsultasi untuk perbaikan masalah, perwakilan dari masing-masing daerah atau dinas tersebut juga dapat melakukan pencocokan data bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai kebutuhan dan bidangnya masing-

masing.

Beberapa waktu sebelumnya Ainun Na'im menyampaikan bahwa pokok pembahasan pada RNPk 2015 melingkupi tugas dan program-program Kemendikbud. Beberapa di antaranya adalah program yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, dan program prioritas pemerintah untuk membantu anak usia sekolah untuk tetap bersekolah. "Dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) guna menuju wajib belajar (wajib) 12 tahun," katanya pada gelar wicara dengan Radio Sindo Trijaya, di Kantor Kemendikbud, Jumat (27/03/2015).

Ainun mengatakan, ada perbedaan signifikan dalam penyelenggaraan RNPk tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Terutama dari pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan di forum tersebut,

misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), wajar 12 tahun, dan program-program yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi guru, implementasi kurikulum, ujian nasional, juga dari aspek bahasa dan kebudayaan.

Dari tema-tema yang akan dibahas, kata Ainun, tema tentang peningkatan kualitas dan kompetensi guru akan menjadi perhatian penting. Selain itu, ada pula pembahasan tentang konten yang tercermin dari kurikulum dan assessment yang digunakan untuk mengukur kompetensi siswa.

Tema yang diangkat dalam RNPk 2015 adalah "Memperkuat Pelaku dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Dilandasi Semangat Gotong Royong". Ainun menjelaskan, pemilihan tema tersebut dilandasi dengan kesadaran bahwa kementerian tidak hanya mementingkan program, tapi lebih kepada pelibatan masyarakat dengan gerakan. "Sifat Gotong royong itu harus kita kembangkan," katanya.

RNPk 2015 mengundang 916 peserta yang berasal dari elemen pemerintah dan masyarakat. Sesuai jadwal, wakil presiden Jusuf Kalla akan hadir dan membuka acara tersebut Senin (30/03/2015) pagi. Kehadiran sosok yang sangat memperhatikan pembangunan ini diharapkan akan memberi arahan bagi pembangunan dan pendidikan.

Lebih jauh Ainun Na'im mengatakan, RNPk 2015 akan menghadirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro. "Kehadiran Mendagri perlu karena sebagian besar urusan pendidikan dikelola daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pendidikan menjadi salah satu bidang yang diotonomikan," ujarnya.

Sedangkan Menkeu, lanjut Ainun, akan membahas tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Ada perubahan di situ. Karena itu perlu kehadiran Mendagri dan Menkeu," katanya.

RNPk 2015 diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman yang lebih baik lagi dari semua pihak mengenai program-program pendidikan yang dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ainun mengakui salah satu kendala yang dihadapi dalam menjalankan kebijakan di bidang pendidikan adalah otonomi daerah. "Karena kita tidak punya akses langsung ke daerah," ujarnya

Namun ia menegaskan, fungsi pengawasan tetap ada dan berjalan. Untuk pengawasan eksternal pemerintah, negara memiliki Badan Pengawas Keuangan (BPK), untuk internal pemerintah ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan untuk internal Kemendikbud ada Inspektorat Jenderal. Sedangkan di daerah juga terdapat Inspektorat Daerah.

"Untuk akses kita memang tidak bisa langsung, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengetahui bagaimana pendidikan dilaksanakan di daerah," tutur Ainun. (aline, desliana, agi, emi)

# Perkuat Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan Lewat Kerangka Strategis

**Kerangka strategis yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selama kurun waktu 2015-2019 adalah membentuk insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan dilandasi semangat gotong royong. Kerangka strategis tersebut dijabarkan dalam tiga strategi, salah satunya adalah memperkuat pelaku pendidikan dan kebudayaan.**



Seorang guru tengah mengajar di SD Negeri 7 Kleco, Surakarta, Jawa Tengah. Guru adalah salah satu pelaku pendidikan yang akan mendapat penguatan peran oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

**A**da tiga strategi yang diterapkan Kemendikbud untuk memperkuat pelaku pendidikan dan kebudayaan. Pertama adalah memperkuat peran siswa, kepala sekolah, guru, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam suatu ekosistem pendidikan. Kedua, memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Terakhir, yaitu fokus kebijakan diarahkan kepada penguatan perilaku pelaku pendidikan dan kebudayaan yang mandiri dan berkepribadian.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Anies Baswedan pada acara seminar *South East Asia Bureau Chief The Economist, Indonesia Summit 2015*, di Jakarta, Kamis (11/2), menyampaikan bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan hanya dalam jumlah yang besar, tetapi juga yang berkualitas. "Untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang utama dapat dimulai dari guru," ucap Mendikbud.

Peran guru dan penyempurnaan cara mengajar guru dalam memberikan pendidikan kepada para siswa menjadi gambaran terciptanya kualitas SDM yang berkualitas. Seorang guru, kata Mendikbud, dapat memberikan keteladanan mengenai kedisiplinan, kejujuran, ketekunan, dan

ketangguhan. "Teladan tersebut sebenarnya dasar insting yang dimiliki masyarakat Indonesia. Bila itu dapat ditanamkan kepada siswa, maka akan memiliki dampak besar bagi kehidupan mereka di masa mendatang," tutur Mendikbud dalam seminar tersebut.

Pada kesempatan yang lain, Mendikbud menuturkan, guru adalah penuai wajah masa depan Indonesia, dan di ruang kelas itulah anak-anak dipersiapkan untuk menyongsong masa depan. Guru hadir di ruang kelas mewakili seluruh masyarakat Indonesia untuk mencerdaskan, mencerahkan, dan membawa anak bangsa kepada masa depan yang lebih baik. "Oleh sebab itu, di pundak guru, masyarakat Indonesia menitipkan masa depan bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia terdidik," kata Mendikbud di kantornya, Jumat (21/11/2014).

Pelaku pendidikan selanjutnya adalah siswa. Mendikbud mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk bertanya kepada siswa, pendidikan seperti apa yang diinginkan mereka? "Berilah kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pendidikan seperti apa yang diinginkan," ajaknya.

Sekolah, tambah Mendikbud, harus menjadi taman yang menyenangkan bagi

siswa. "Tujuan kita adalah menjadikan anak-anak menjadi seorang pembelajar. Kalau seseorang bisa menjadi pembelajar, maka seumur hidup dia bisa belajar terus dan bisa meraih masa depan yang cerah," tuturnya.

## Pendidikan Orang Tua

Mendikbud mengatakan, orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Sayangnya, banyak di antara orang tua ini tidak tersiapkan dengan baik, sehingga tidak tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Padahal, interaksi pada tahun-tahun awal antara anak dan orang tua sebagai pelaku pendidikan, serta kondisi lingkungan rumah memberikan pengaruh menetap dan jangka panjang bagi kematangan perkembangan anak.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, telah ditetapkan salah satu sasaran pembangunan pendidikan adalah: "Penduduk usia dewasa memperoleh layanan pendidikan keayuhbundaan dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa". Merujuk pada RPJMN

tersebut, Kemendikbud, akan membentuk satu direktorat yang menangani pembinaan pendidikan keluarga, sebagai upaya perluasan pendidikan keorngtuaan.

Terbentuknya direktorat baru ini diharapkan dapat memberdayakan orang tua atau pengasuh untuk berpartisipasi aktif dalam program sasaran, khusus terkait peningkatan akses dan mutu pendidikan. Selain itu juga dapat mendorong para orang tua atau pengasuh untuk peduli dan terlibat, sehingga dapat sadar akan pendidikan, aktif memberikan stimulus, terus menerus belajar dan mendampingi anak.

Berbagai program pengembangan orang tua dan keluarga selama ini sebenarnya sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Pengembangan tersebut dapat menjadi rujukan praktik baik yang disebarkan melalui kanal, dan mekanisme yang dimiliki atau didukung oleh Kemendikbud. Dengan demikian, Kemendikbud akan berfungsi sebagai hub, dan mengambil tanggung jawab dalam teladan pengembangan dan penyebaran ilmu pendidikan bagi orangtua. (Seno)

## Jupel, Aktor Kebudayaan yang Juga Akan Diperkuat

Salah satu aktor kebudayaan yang juga akan dikuatkan perannya adalah juru pelihara atau biasa disingkat dengan jupel. Jupel merupakan pelaku kebudayaan dalam hal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia. Selain bertanggung jawab menjaga kebersihan candi atau tempat wisata budaya lainnya, Jupel juga bertindak seperti pemandu wisata yang siap menjawab setiap pertanyaan pengunjung.

Slamet Sugeng, seorang jupel yang bertugas di Candi Bajangratu, Trowulan, Jawa Timur. Saat ditemui di lokasi candi pada pertengahan Juni tahun lalu, ia mengemukakan, menjadi jupel berarti harus total dalam bekerja. Jam bekerja bergantung kepada pengunjung. "Walaupun pukul 18.00 tutup jika masih ada pengunjung, maka candi tetap dibuka. Bahkan lebaran pun tetap masuk untuk melayani pengunjung," kata Slamet yang pernah meraih juara dua Jupel Terbaik tingkat nasional pada 2011.

Bagi Slamet, setiap tamu yang datang harus dilayani dengan baik, meskipun kedatangan mereka di luar jam berkunjung. Jupel dituntut mampu menjelaskan banyak hal mengenai candi yang menjadi tanggung jawabnya. Memberi penjelasan kepada pengunjung paling banyak menyita waktu, karena kebanyakan pengunjung menanyakan sejarah candi.

Tugas jupel, kata Slamet, tidak hanya memandu dan memberikan penjelasan mengenai objek wisata kepada pengunjung, tetapi juga membersihkan candi sekaligus taman sekitarnya. (Seno)

# Perluasan Akses Pendidikan Bagi Masyarakat Terpinggirkan

**Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun faktanya, ketimpangan kondisi sosial ekonomi membuat masyarakat miskin sulit untuk mengenyam pendidikan yang layak tanpa tersandung masalah ekonomi lainnya. Melihat fenomena tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyusun sebuah kerangka strategis untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan.**

**K**erangka strategis itu salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan program bantuan biaya personal bagi siswa miskin dan rentan miskin. Di tahun 2015 ini, target penerima bantuan dari program tersebut mencapai 19,2 juta anak. Program yang diluncurkan di lima titik oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran Menteri Kabinet Kerja pada 3 November 2014 lalu, menyediakan kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai jalan masuk siswa miskin ke sekolah.

**Kelompok masyarakat yang harus dibantu tak hanya bagi siswa yang sudah berada di sekolah, tapi juga menyasar pada anak usia sekolah yang tidak lagi berada dalam pendidikan formal. Mereka akan dilatih di balai latihan kerja.**

Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan kartu identitas untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP). KIP diberikan kepada peserta didik atau anak-anak yang berusia 6 s.d. 21 tahun dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pemerintah menyediakan total anggaran Rp 12,42 triliun untuk Program Indonesia Pintar. Dari total anggaran tersebut, Rp7,1 triliun di antaranya diusulkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Anies Baswedan mengatakan, dari alokasi yang diusulkan, konsentrasi anggaran tersebut fokus pada penyelesaian masalah putus sekolah dan memastikan anak bisa sekolah terutama dari kelompok yang miskin. "Dengan Program Indonesia Pintar, maka fondasi di 2015 untuk mengurangi anak-anak putus sekolah itu bisa kita lakukan," kata Mendikbud pada rapat kerja dengan Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu.

Jumlah 19,2 juta siswa merupakan gabungan dari 14,3 siswa miskin ditambah

dengan 4,9 juta anak usia sekolah yang tidak sekolah. Masing-masing anak akan menerima bantuan sesuai jenjang masing-masing. Untuk SD Rp 450.000, SMP Rp 750.000, dan SMA/SMK Rp 1 juta.

Mendikbud menjelaskan, angka putus sekolah lebih tinggi pada kelompok pengeluaran (konsumsi) yang lebih rendah. Artinya, kelompok masyarakat yang harus dibantu tak hanya bagi siswa yang sudah berada di sekolah, tapi juga menyasar pada anak usia sekolah yang tidak lagi berada

dalam pendidikan formal. Mereka akan dilatih di balai latihan kerja. "Di sinilah KIP digalakkan," tuturnya.

Kemendikbud terus mengimbau penerima KIP segera mendaftarkan diri ke sekolah masing-masing. Hal tersebut perlu dilakukan agar penerima KIP dapat terdata sebagai calon penerima manfaat PIP. Kepala sekolah juga diharapkan dapat bekerja maksimal dalam pendataan anak-anak peserta KIP dan menyampaikan data tersebut kepada dinas pendidikan setempat. **(Aline)**

## Tanggap Lintasan Berisiko Bagi Siswa, Buka Akses Lebih Luas

Selain perluasan akses pendidikan dengan pembiayaan, Kemendikbud menyadari pentingnya perluasan akses yang mempertimbangkan keselamatan peserta didik. Baik selama di sekolah maupun perjalanan menuju sekolah. Mengingat masih banyak lintasan berisiko yang digunakan siswa ketika menuju sekolah, Kemendikbud menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) untuk melakukan perbaikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Anies Baswedan mengatakan jika dilihat dari administratif kewilayahan, perbaikan lintasan berisiko merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Namun karena hal ini mendesak dilakukan, maka pemerintah pusat akan membantu. "Sekarang bukan soal itu, tapi bisa dikerjakan siapa. Kementerian PUPR sudah menyiapkan," katanya saat konferensi pers di kantor Kemendikbud, Jumat (13/3).

Untuk menghimpun data dari masyarakat, Kemendikbud menyiapkan sebuah portal yang bisa diakses oleh masyarakat untuk melaporkan lokasi-lokasi yang berisiko bagi anak-anak untuk melintas. Portal yang bernama [sahabat.kemdikbud.go.id](http://sahabat.kemdikbud.go.id) ini akan merangkum data-data dari masyarakat untuk kemudian diverifikasi. Setelah verifikasi dilakukan dan data yang diperoleh benar, Kemendikbud akan berkoordinasi dengan Kemen-PUPR untuk memperbaiki lintasan tersebut.

Mendikbud mengatakan, ikhtiar pemerintah untuk menyediakan lintasan yang layak guna bagi peserta didik ini merupakan pengejawantahan nawacita pemerintah Jokowi-JK. Di poin pertama nawacita tersebut tertulis bahwa pemerintah bertekad menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.

Nawacita ini juga sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap warga negara termasuk melindungi siswa yang akan belajar adalah bagian dari janji kemerdekaan ini. "Pemerintah berniat menjalankan nawacita ini," tuturnya.

Melalui ikhtiar ini Mendikbud meminta bantuan kepada para kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat umum untuk melaporkan lintasan-lintasan berbahaya, penuh risiko, yang harus diperbaiki. Lintasan yang berisiko ini terdapat di seluruh pelosok Indonesia dan mayoritas dilintasi siswa sekolah dasar. "Jangan bekali anak-anak yang berangkat mencapai masa depan cerah itu dengan risiko keselamatan. Negara harus hadir dan negara harus menghilangkan risiko keselamatan untuk anak-anak," katanya. **(Aline)**



FOTO: DOK. PH

Dua siswa SD berangkat menuju sekolah dengan berjalan kaki. Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), anak-anak dari keluarga miskin dan hampir miskin memiliki kesempatan untuk masuk ke sekolah dan mencegah putus sekolah.

# Tingkatkan Mutu Pendidikan Sesuai Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Sejumlah perubahan kebijakan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) semata-mata untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Upaya peningkatkan mutu pendidikan itu misalnya dengan mengubah kebijakan ujian nasional (UN) yang saat ini tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan. Melalui kebijakan ini, Kementerian mengajak semua pihak untuk mengubah cara pandang terhadap UN. Dari sekadar UN sebagai tes atas hasil belajar menjadi tes sebagai pembelajaran.



Suasana ujian nasional (UN) di SMA Negeri 4 Medan, Sumatera Utara, tahun lalu. Kebijakan UN tahun ini yang berubah merupakan salah satu upaya Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

**K**ementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyadari bahwa menilai mutu layanan pendidikan tidak bisa semata-mata dari hasil ujian nasional (UN). Ujian nasional (UN) hanya satu dari sekian banyak indikator dalam standar nasional

pendidikan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, siswa sesungguhnya berhak mengetahui capaian kompetensinya dan negara berkewajiban memenuhi hak itu.

“Jadi pengukuran capaian standar kompetensi lulusan adalah peran negara

untuk memenuhi hak peserta didik,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan pada konferensi pers UN beberapa waktu lalu.

Mendikbud mengatakan, UN seharusnya memberi dampak positif bagi siswa, guru, dan komunitas pendidikan yang lebih luas lagi. Namun, kenyataan di lapangan justru menimbulkan perilaku negatif, seperti terjadinya kecurangan, siswa mengalami stress, dan lain-lain. “Mengapa ini terjadi? Karena sifat ujiannya itu high-stake testing. Nah, kita ingin mengubahnya,” ucap Mendikbud.

Maka, upaya perbaikan yang dilakukan adalah dengan memperbaiki mutu pendidikan melalui berbagai alat pengukuran yang bukan hanya UN, serta memberikan otonomi pada sekolah dan mengurangi tekanan yang

tidak perlu, dengan cara memisahkan ujian nasional dari kelulusan. “Kita juga ingin memperbaiki sistem penilaian menjadi lebih bermakna, dan mendorong pembelajaran serta integritas,” kata Mendikbud.

Kebijakan lainnya adalah UN dapat ditempuh lebih dari sekali. Bagi mereka yang hasilnya kurang, punya kesempatan memperbaiki dan mengambil ujian ulang. Karena tujuan UN bukan menjadi hakim, tapi alat pembelajaran. Konsep ujian ulang belum diterapkan tahun ini, tapi tahun depan. Caranya, awal semester akhir peserta didik sudah dapat mengambil UN. Dan bila diperlukan ada perbaikan, maka mereka bisa melakukan perbaikan di akhir semester akhir. “Ini baru bisa diterapkan di 2016,” katanya.

Setiap siswa yang sudah menempuh UN akan mendapatkan sertifikat hasil UN (SHUN). Sertifikat ini menyatakan kategori capaian mata pelajaran, bukan kelulusan. Ada beberapa informasi yang dirangkum dalam SHUN, yaitu identitas peserta UN (nama, tempat tanggal lahir, sekolah, jurusan, NISN, Nomor Peserta Ujian, NPSN, Kurikulum), capaian siswa dalam mata pelajaran UN, dan informasi analisis kompetensi, capaian siswa terhadap rata-rata nilai UN sekolah dan nasional.

Dalam SHUN juga terdapat informasi yang bermanfaat untuk siswa dan orang tuanya. Informasi tersebut berupa nilai tes, kategori dan deskripsi, serta peta subkompetensi untuk perbaikan. **(Aline)**

**Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, siswa sesungguhnya berhak mengetahui capaian kompetensinya dan negara berkewajiban memenuhi hak itu.**

## Kurikulum 2013 Diperbaiki dan Akan Dilaksanakan Bertahap

**Mutu pendidikan** juga erat kaitannya dengan kurikulum. Kurikulum 2013 yang diterapkan pertama kali pada tahun pelajaran 2013/2014 secara terbatas, diperbaiki. Setelah berjalan selama tiga semester kurikulum ini dievaluasi kembali.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengatakan, evaluasi Kurikulum 2013 dijadwalkan selesai November 2015. Sementara itu, sekolah diminta untuk mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Setelah dievaluasi, Kurikulum 2013 akan dilaksanakan secara bertahap. “Implementasi Kurikulum 2013 dimulai dari tahun ini dengan jumlah sasaran sebanyak 6.221 sekolah,” kata Mendikbud dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, akhir Januari lalu.

Setelah mulai diimplementasikan tahun ini, 15 persen sekolah juga akan ikut

menerapkannya di 2016, 45 persen di 2017, dan 100 persen di 2018. Mendikbud mengatakan, selama perjalanan bertahap, Kemendikbud akan terus mendampingi sekolah-sekolah yang mengimplementasikan Kurikulum 2013 ini. Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk), kata dia, memiliki kontrol kepada 6.221 sekolah itu melalui aplikasi dapodik (data pokok pendidikan). Dengan dapodik, setiap ada koreksi yang harus disampaikan kepada sekolah, Puskurbuk tahu ke mana harus menghubungi sekolah.

Mendikbud meminta agar sekolah yang belum ditunjuk sebagai sekolah uji coba untuk tetap melaksanakan KTSP. “Ini bukan masalah dilarang menerapkan. Tapi kita mau evaluasi dan uji coba dulu. Setelah uji coba selesai, jadi rintisan. Sekolah lain belajar dari sekolah rintisan ini,” katanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan memberikan waktu paling lambat tujuh tahun bagi satuan pendidikan dasar dan menengah untuk mengimplementasikan peraturan ini. “Insya Allah tidak akan menunggu sampai tujuh tahun, tetapi kita tidak punya alasan untuk terburu-buru,” katanya.

Mendikbud menegaskan, pihaknya tidak ingin para peserta didik dan guru menjalankan Kurikulum 2013 yang belum diuji dan diperbaiki. “Kalau mau tetap dijalankan maka konsekuensi dari itu ada di tangan sekolah,” katanya. **(Aline)**

# UU 23/2014 Atur Pembagian Tugas Pusat dan Daerah

**Mengelola anggaran negara adalah tugas bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Guna mencapai tujuan bersama, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu mengetahui pembagian kewenangannya masing-masing. Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian kewenangan ini, termasuk untuk urusan di bidang pendidikan dan kebudayaan.**

Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, baik pusat dan daerah memiliki kewenangan masing-masing dalam urusan pemerintahan. Di bidang pendidikan, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam hal manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra.

Kewenangan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi pemerintah pusat di antaranya adalah penetapan standar nasional pendidikan, pengelolaan pendidikan tinggi, penetapan kurikulum nasional pendidikan, dan akreditasi. Pusat juga punya kewenangan dalam hal pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, pengembangan karir pendidik, penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan

penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing, serta pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.

Sementara itu, kewenangan untuk pemerintah provinsi di antaranya pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus, serta pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Sedangkan kewenangan untuk pemerintah kabupaten/kota sesuai undang-undang tersebut di antaranya pengelolaan pendidikan dasar, PAUD, dan nonformal, termasuk penetapan kurikulum muatan lokal untuk tiga jenjang pendidikan tersebut, serta pemindahan pendidik dan tenaga

## Kemendikbud Serius Kembangkan Efektivitas Birokrasi

Salah satu dari tiga kerangka strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun ke depan adalah mengembangkan efektifitas birokrasi melalui perbaikan tata kelola dan pelibatan publik. Kemendikbud berupaya memperbaiki birokrasi di lingkungan kementerian agar tercipta tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan mengatakan, anggaran pendidikan dan kebudayaan yang dikelola pemerintah bukan diambil dari hasil pemanfaatan sumber daya alam, melainkan dari iuran pajak bersama yang dibayarkan kepada pemerintah. "Justru, sekarang kita harus menempatkan ini sebagai pool yang dititipkan untuk kita jalankan sama-sama," katanya di Jakarta, Selasa (23/2).

Mendikbud menyampaikan, anggaran negara di bidang pendidikan tahun 2015 mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Sebanyak 12,7 persen dikelola oleh Kemendikbud sedangkan 62,2 persen langsung di transfer ke daerah-daerah. Besarnya anggaran di daerah tersebut, kata dia, membutuhkan peran penguatan berupa fungsi kontrol bersama antara pemerintah pusat dan masyarakat. Jadi, keterlibatan publik menjadi hal yang sangat penting dalam program-program pendidikan terutama dalam hal optimalisasi dana-dana kegiatan pendidikan.

Mendikbud menyebutkan secara eksplisit mengenai pelibatan publik dalam kerangka strategis Mendikbud 2015-2019. Pelibatan publik ini akan dilakukan di seluruh aspek pengelolaan kebijakan dengan berbasis data, riset, dan bukti lapangan. Selain itu, hal ini akan membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. "Sekolah-sekolah kita justru akan lebih cepat kemajuannya jika ada pelibatan publik yang kuat di sekolah itu," ujarnya.

Mendikbud mengungkapkan, apabila pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dikerjakan sebagai sebuah engagement antara masyarakat sipil dan negara, maka akan banyak hal yang bisa diselesaikan secara bersama-sama. Agenda pendidikan dan kebudayaan, kata dia, dapat dituntaskan jauh lebih cepat, lebih baik, dan bisa menjangkau capaian yang lebih banyak. (Agi)

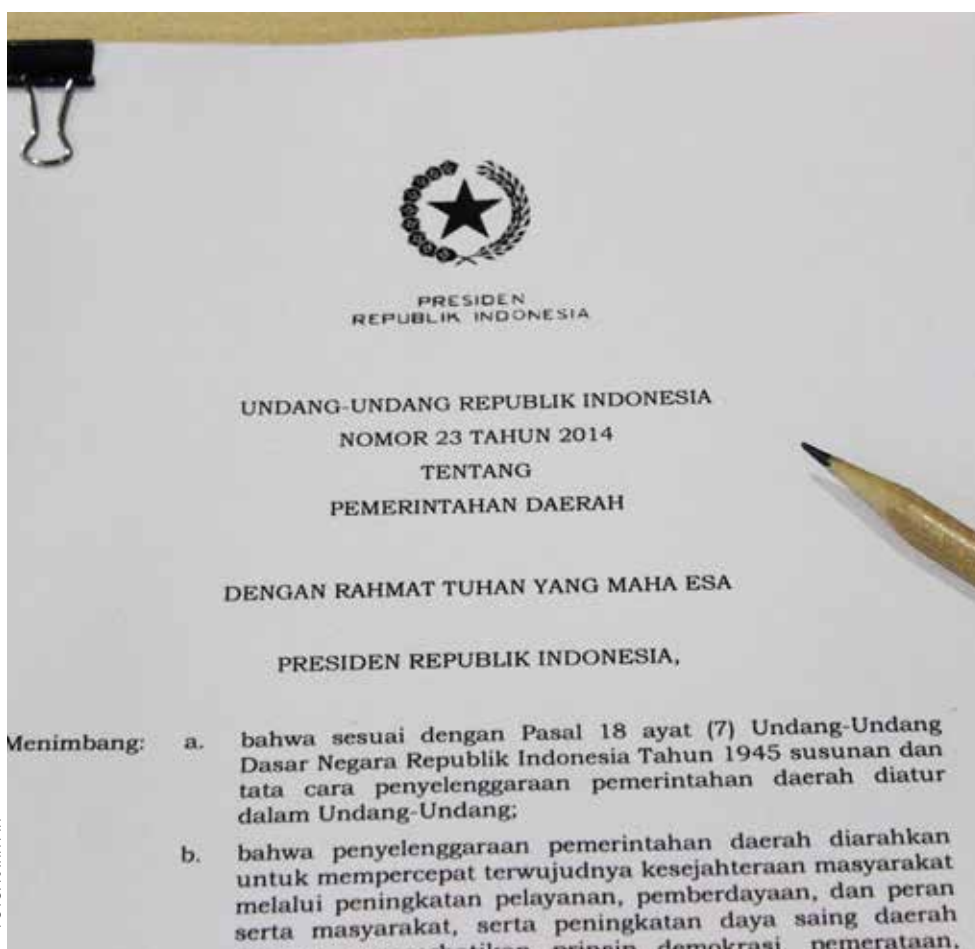
kependidikan dalam daerah kabupaten/kota, juga penerbitan izin pendidikan dasar, PAUD, dan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sesuai dengan UU ini juga, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki kewenangan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, perfilman nasional, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, permuseuman, dan warisan budaya. Kewenangan pemerintah pusat di antaranya adalah pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah provinsi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan, pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas provinsi, dan pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pusat juga memiliki kewenangan dalam hal pembinaan perfilman Indonesia, pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah provinsi, pembinaan sejarah nasional, registrasi nasional cagar budaya, penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat nasional, penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri, penerbitan register museum, dan pengelolaan museum nasional, serta pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia.

Sementara itu untuk pemerintah provinsi, kewenangan mengatur urusan kebudayaan di antaranya adalah pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, pembinaan lembaga adat, dan pembinaan kesenian, yang seluruh masyarakatnya berada dalam lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Pemerintah provinsi juga berwenang dalam pembinaan sejarah lokal provinsi, penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah provinsi, serta pengelolaan museum provinsi.

Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai undang-undang tersebut adalah pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota, pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota, pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota, penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, dan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, serta pengelolaan museum kabupaten/kota. (Agi)





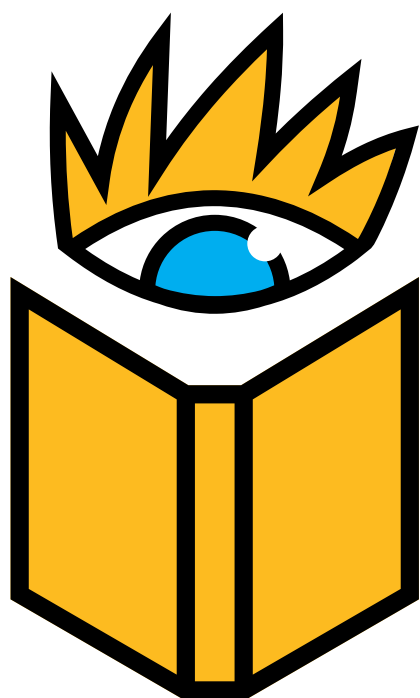


FOTO: LIAN PIH

## Leipzig Book Fair 2015

# Indonesia Tampilkan Berbagai Acara Sastra dan Seni

**Menjadi tamu kehormatan dalam Frankfurt Book Fair (FBF) 2015 berarti siap memenuhi seluruh rangkaian acara yang disiapkan panitia FBF. Diawali dengan Leipzig Book Fair yang berlangsung pada minggu kedua Maret 2015, Indonesia memperkenalkan diri sebagai tamu kehormatan FBF 2015. Asah Asuh berkesempatan meliput langsung acara tersebut dari Leipzig, sebuah kota yang terletak di sebelah timur Jerman dan berdekatan dengan negara Republik Ceko serta Polandia. Lapornya kami sajikan di halaman 9, 10, dan 11 dalam rubrik "Liputan Khusus".**

**A**ku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada.

Puisi itu tidak asing lagi bagi khalayak Indonesia, terutama para penikmat karya sastra. Puisi yang berjudul "Aku Ingin" tersebut merupakan karya sastrawan kawakan Indonesia, Sapardi Djoko Damono. Aktor senior Indonesia, Slamet Raharjo, membacakannya di stan Indonesia di Leipzig Book Fair, saat membuka sesi diskusi bertajuk "A Life in Poetry", Kamis (12/3).

Leipzig Book Fair sendiri berlangsung pada 12-15 Maret 2015 di Leipzig, Jerman. Pameran buku terbesar kedua di Jerman ini merupakan langkah awal perkenalan Indonesia sebagai *Guest of Honour* atau Tamu Kehormatan di Frankfurt Book Fair 2015 pada 14-18 Oktober 2015 mendatang.

Di Leipzig Book Fair, Indonesia menam-

pilkan berbagai acara sastra dan seni untuk mengenalkan Indonesia kepada masyarakat Jerman dan internasional. Selain "reading" atau pembacaan puisi yang dibacakan dalam bahasa Indonesia dan Jerman, ada juga pagelaran tari serta diskusi buku bersama sastrawan dan penulis Indonesia, seperti Sapardi Djoko Damono, Ahmad Tohari, Laksmi Pamuntjak, dan ahli kuliner nusantara, Sisca Soewitomo.

Saat menjadi pembicara dalam diskusi "A Life in Poetry" di Leipzig Book Fair, Sapardi Djoko Damono mengatakan, menulis puisi merupakan sebuah tantangan dalam berbahasa Indonesia. Selain puisi bebas, ia juga merasa kemampuan bahasa Indonesianya tertantang dalam membuat soneta, yaitu puisi yang terdiri dari 14 larik.

Sementara diskusi bertajuk "The Dancer: A Woman's Life in a Time of Terror" bersama Ahmad Tohari, didahului dengan pagelaran seni singkat berupa tari dan lagu dari seniman Wasi Bantolo dan penari Ayun Anindita Setya Wulan. Ayun mementaskan Tari Lengger asal Banyumas, Jawa Tengah,

menjelma sebagai Srintil, tokoh perempuan dalam novel Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk, yang menjadi inspirasi film Sang Penari.

Dalam diskusi tersebut, Ahmad Tohari mengatakan, ia ingin mengenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional mengenai budaya dan kearifan lokal Indonesia melalui karya sastranya. Hal itu juga yang menjadi motivasinya memasukkan unsur sejarah Indonesia yang menjadi latar belakang waktu dalam novelnya.

**Di Leipzig Book Fair, Indonesia menampilkan berbagai acara sastra dan seni untuk mengenalkan Indonesia kepada masyarakat Jerman dan internasional.**

### Kuliner Indonesia

Selain itu, kuliner khas Indonesia juga menjadi salah satu tema diskusi yang diminati pengunjung Leipzig Book Fair. Dalam diskusi itu chef kenamaan Sisca Soewitomo menjelaskan bumbu dasar di Indonesia terdiri atas tiga warna, yaitu merah, kuning dan putih. Merah, misalnya untuk cabai, kuning untuk kunyit, dan putih untuk kemiri dan bawang putih. Dari tiga warna bumbu dasar tersebut dapat dibuat beragam masakan Indonesia.

Untuk mendukung penampilannya dalam acara diskusi, Sisca membawa

berbagai bumbu dasar Indonesia, baik yang masih berbentuk asli, maupun yang sudah dihancurkan menjadi bumbu, sehingga aroma khas setiap bumbu dasar dapat dirasakan peserta diskusi dengan menciumnya.

Sebagai penutup di hari terakhir, Minggu (15/3), Indonesia menampilkan pagelaran mini berupa kesenian berpuisi dalam gerak dan tari. Konsep pagelaran adalah berpuisi dengan gerak dan bunyi, tidak secara verbal seperti halnya berpuisi biasa.

"Jadi intinya bagaimana setiap lekukan dari tubuh ini mempuisikan apa yang ada di dalam keinginan hati," ujar Wasi Bantolo yang tampil bersama penari Ayun Anindita Setya Wulan. Keduanya berusaha menyampaikan isi puisi melalui gerak dan bunyi.

Musikalisasi puisi juga digunakan dengan menggunakan lagu Panca Indra ciptaan seniman Gunarto Gondrong. Saat Ayun menembangkan lagu tersebut, Wasi pun menari srimpi, atau sering disebut nyerimpi/mbedoyo.

Slamet Rahardjo juga tampil dengan membacakan puisi berjudul "Telinga" yang berupa dialog antara Bima dengan Dewa Ruci dalam pencarian air kehidupan. Wasi lalu menjadi lawan dialog Slamet Rahardjo dengan gendang sebagai media.

Wasi yakin masyarakat Jerman di Leipzig Book Fair bisa mengerti apa yang disampaikan melalui pagelaran seni itu. "Ketika menampilkan sesuatu yang abstrak di depan audiens yang memiliki budaya yang sangat berbeda, mereka tidak membatasi ruang imajinasi," katanya. **(Desliana)**



# Penerjemahan Karya Sastra Indonesia Tandatangani Kontrak Penerjemahan dengan Penerbit Jerman

**Semakin banyak penulis Indonesia yang ingin menerjemahkan karyanya ke dalam bahasa asing dan menjalin kerja sama internasional dengan penerbit negara lain. Pemerintah pun dituntut untuk mendukung program penerjemahan karya sastra, dengan tujuan mengenalkan dan menyebarkan kebudayaan Indonesia ke seluruh dunia melalui karya sastra.**

**V**ice President Frankfurt Book Fair, Claudia Kaiser mengatakan, sebagai tamu kehormatan di Frankfurt Book Fair 2015, Indonesia memiliki program wajib berupa program penerjemahan. "Inti dari Frankfurt Book Fair adalah penerjemahan karya sastra. Tapi bukan hanya itu, pengenalan budaya dari tamu kehormatan juga termasuk," katanya.

Indonesia sebagai tamu kehormatan Frankfurt Book Fair 2015 memang memiliki Program Penerjemahan Buku. Program tersebut hingga sekarang masih dalam proses. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menargetkan sekitar 200 buku Indonesia untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Salah satu tantangannya adalah terbatasnya jumlah penerjemah bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jerman, yaitu hanya sekitar 10 orang.

Pada Leipzig Book Fair yang berlangsung di Leipzig, Jerman, pertengahan Maret lalu, Indonesia melalui Komite Nasional Program Guest of Honour Frankfurt Book Fair 2015 menandatangani kontrak dengan penerbit Jerman. Penandatanganan kontrak berlangsung di stan Indonesia di Leipzig Book Fair, pada Sabtu (14/3).

Kontrak antara Indonesia dengan penerbit Jerman ditandatangani Ketua Komite Nasional Indonesia Program Guest of Honour Frankfurt Book Fair 2015, Goenawan Mohamad. Sedangkan dua penerbit Jerman yang menandatangani kontrak adalah Barbara Weidle dari Penerbit Weidle, dan Eva Streifeneder dari Penerbit Regiospectra.

Penerbit Weidle akan menerbitkan novel karya Leila S. Chudori yang berjudul "Pulang". Sedangkan Penerbit Regiospectra akan menerbitkan buku nonfiksi karya Antariksawan, penulis asal Yogyakarta, yang berjudul "Tuan Tanah Kawin Muda".

Wakil dari Penerbit Weidle, Barbara Weidle mengatakan alasan perusahaannya tertarik menerjemahkan novel "Pulang" ke dalam bahasa Jerman dan menerbitkannya. Cerita dalam novel "Pulang" dinilai menantang dan sangat kompleks. Leila S. Chudori juga dinilai sebagai penulis perempuan dengan karakter yang kuat. Barbara mengatakan, pihaknya mengetahui novel "Pulang" dari novel terjemahan bahasa Inggris yang diterbitkan Yayasan Lontar di Indonesia.

Sementara Eva Streifeneder menga-



Ketua Komite Nasional Program Guest of Honour FBF 2015, Goenawan Mohamad menandatangani kontrak penerjemahan buku terbitan penulis Indonesia dengan penerbit Jerman yang berlangsung di stan Indonesia di Leipzig Book Fair, Sabtu (14/3).

takan Penerbit Regiospectra memang khusus menerbitkan buku nonfiksi. Dan buku nonfiksi karya Antariksa yang berjudul "Tuan Tanah Kawin Muda" dinilai sebagai buku yang menarik untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. "Dalam bidang nonfiksi tidak gampang menemukan buku yang cocok untuk diterjemahkan," katanya.

**Penerbit Weidle akan menerbitkan novel karya Leila S Chudori yang berjudul "Pulang". Sedangkan Penerbit Regiospectra akan menerbitkan buku nonfiksi karya Antariksawan, penulis asal Yogyakarta, yang berjudul "Tuan Tanah Kawin Muda".**

FOTO: LIAN PIH

## Masukkan Nilai Budaya Lewat Komik

**Industri perbukuan** di Indonesia tidak hanya diramaikan oleh novel dan karya sastra lainnya. Komik dan buku cerita bergambar turut mewarnai dunia perbukuan Indonesia. Untuk memperkenalkan komik dan buku cerita bergambar Indonesia ke dunia internasional, komikus dan ilustrator Indonesia pun turut hadir di Leipzig Book Fair, Jerman, sekaligus mempromosikan Indonesia sebagai Tamu Kehormatan Frankfurt Book Fair 2015.

Beng Rahadian, seorang komikus Indonesia hadir sebagai pembicara dalam diskusi bertajuk "The Indonesian Graphic Novel" beserta Evan Raditya, ilustrator buku cerita anak.

Dalam membuat komik dan buku cerita bergambar, baik Beng maupun Evan mengaku kerap memasukkan unsur budaya dan nilai-nilai kultural Indonesia. Beng mencontohkan cerita Mahabarata, sebuah mitologi dari India. Ia mengatakan di Indonesia cerita Mahabarata diadaptasi dan disesuaikan dengan kultur Indonesia.

"Misalnya tokoh Drupadi bersuamikan lima orang. Tapi Drupadi di Indonesia hanya memiliki satu suami karena di Indonesia tidak boleh bersuami lebih dari satu," jelasnya saat sesi diskusi di Leipzig Book Fair, Jumat (13/3). Sementara Evan dalam membuat buku cerita bergambar lebih suka memasukkan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari.

Beng berharap, keterlibatan Indonesia dalam FBF dapat menemukan koneksi antara Jerman dengan Indonesia. "Sehingga kita punya satu hal yang bisa kita share. Apa yang kita ciptakan bisa diterima di sini dan sebaliknya. Sehingga ada satu hubungan yang mutualistik," katanya. Begitu juga Evan, yang berharap bisa menambah wawasan dan referensi dalam membuat cerita bergambar. **(Desliana)**

Ketua Komite Penerjemahan, Husni Syawie menuturkan, hingga saat ini sebenarnya sudah ada empat penerbit Jerman yang sudah sepakat menandatangani kontrak dengan Indonesia untuk menerjemahkan dan menerbitkan buku Indonesia. Selain dua penerbit itu, ada juga Penerbit Carl Hanser yang akan menerjemahkan dan menerbitkan karya Andrea Hirata yang berjudul "The Dreamer", dan Penerbit Horleman untuk buku "Jangan Tulis Kami Teroris" karya Linda Christanty.

Seorang Indonesianis yang juga penerjemah dan editor, John McGlynn mengatakan, penerjemahan suatu karya sastra merupakan hal yang sangat penting dalam mengenalkan budaya suatu bangsa. "Karya sastra bisa menjadi alat untuk membuat orang lain memahami budaya negara asal karya sastra tersebut, terutama budaya yang tidak ditemui di negara yang menjadi target penerjemahan," katanya.

John yang juga salah satu pendiri Yayasan Lontar mengapresiasi langkah Pemerintah Indonesia yang mendukung program penerjemahan di Frankfurt Book Fair. Ia berharap pemerintah bisa terus memberikan dukungan, baik berupa dana maupun komitmen. **(Desliana)**

## Leipzig Book Fair 2015

# Publik dan Media Jerman Soroti Indonesia

**Penampilan Indonesia di Leipzig Book Fair sebagai langkah awal menuju Guest of Honour atau Tamu Kehormatan Frankfurt Book Fair 2015, dinilai baik oleh beberapa kalangan. Indonesia pun mendapatkan sambutan hangat dari publik Jerman, terbukti dari stan Indonesia di Leipzig Book Fair yang selalu ramai dikunjungi.**

**K**etua Komite Nasional Indonesia Program *Guest of Honour* Frankfurt Book Fair 2015, Goenawan Mohammad mengatakan, salah satu pujian datang dari penerbit Jerman Ullstein Verlag, yang menerjemahkan dan menerbitkan novel karya penulis Indonesia, Laksmi Pamuntjak. "Mereka bilang belum pernah ada *Guest of Honour* Frankfurt Book Fair yang mendapat perhatian seperti ini di Leipzig Book Fair," katanya di stan Indonesia di Leipzig Book Fair, Jerman, Minggu (15/3).

Bahkan penampilan Indonesia di Leipzig Book Fair pada 12-15 Maret lalu dinilai lebih baik dari *Guest of Honour* Frankfurt Book Fair tahun 2014, Finlandia. "Ini lebih baik daripada tahun kemarin," puji Claudia Kaiser, *Vice President* Frankfurt Book Fair.

Goenawan mengatakan, setelah melihat penampilan Indonesia di Leipzig Book Fair, banyak wartawan Jerman yang mendaftarkan diri untuk datang ke Indonesia. "Sudah 15 wartawan Jerman mendaftar melalui *public relation* Komite Frankfurt Book Fair," katanya.

Berbagai harapan datang dari masyarakat Jerman maupun masyarakat Indonesia yang tinggal di Jerman. Eva Streifeneder, misalnya, dari penerbit Regiospectra Jerman. Ia berharap Indonesia bisa tampil dengan baik dan modern dalam mengenalkan kebudayaan Indonesia sehingga masyarakat internasional dapat mengenal Indonesia lebih baik. "Indonesia tidak boleh tampil kuno," kata perempuan yang pernah tinggal di Yogyakarta itu.

Sementara Hendrik Ruitenbergh, seorang pecinta kuliner Indonesia mengaku tidak banyak mengenal Indonesia. Ia hanya tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan, dan kuliner Indonesia adalah satu-satunya hal yang ia ketahui dari Indonesia. Karena itu ia berharap dapat mengenal Indonesia lebih jauh saat Frankfurt Book Fair nanti.

Harapan juga datang dari warga negara Indonesia yang tinggal di Jerman. Suhendra,

seorang doktor lulusan Jerman yang bekerja di Jerman, mengakui Indonesia belum dikenal dengan baik di Jerman. Hendra berharap di Frankfurt Book Fair (FBF) nanti Indonesia bisa menghadirkan karya sastra yang berkualitas yang bisa dinikmati bukan saja oleh orang Indonesia tapi juga oleh dunia internasional.

"Bila dengan FBF ini semakin banyak orang mengenal Indonesia dan semakin banyak yang mengakui tulisan tentang sastra dan budaya Indonesia yang berkualitas, kami WNI yang berada di Jerman akan semakin mudah lagi memperkenalkan semua kelebihan yang dimiliki Indonesia," ujarnya.

### Diliput Media Jerman

Media Jerman pun menyoroti Indonesia dan memasukkan Indonesia sebagai salah satu berita nasional mereka selama penyelenggaraan Leipzig Book Fair. Kantor berita Jerman, Deutsche Presse-Agentur (DPA), memberitakan bahwa Indonesia sebagai tamu kehormatan Frankfurt Book Fair 2015 akan memboyong sekitar 70 penulis ke Jerman. Mereka mengutipnya dari jumpa pers di stand Indonesia di Leipzig Book Fair pada Kamis (12/3).

DPA juga menulis alasan Indonesia terpilih sebagai tamu kehormatan Frankfurt Book Fair di antaranya adalah karena Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang padat penduduknya dan memiliki banyak penulis muda.

"Dengan penampilan Indonesia nanti, harus tercipta suatu jaringan internasional. Indonesia harus secara permanen dimediasi oleh sastra dan budaya," ujar Presiden Frankfurt Book Fair, Juergen Boos, seperti dikutip DPA.

Selain itu, DPA juga mengutip perkataan Ketua Komite Nasional Indonesia Program *Guest of Honour* Frankfurt Book Fair, Goenawan Mohamad, yang mengatakan Indonesia juga akan memperkenalkan warisan arsitektur, seni kontemporer dan



Suasana stan Indonesia di Leipzig Book Fair yang berlangsung di Leipzig, Jerman, 12-15 Maret 2015 yang lalu. Penampilan Indonesia sebagai tamu kehormatan FBF 2015 di Pameran Buku Leipzig ini diakui lebih baik dari penyelenggaraan tahun lalu.

**Media Jerman pun menyoroti Indonesia dan memasukkan Indonesia sebagai salah satu berita nasional mereka selama penyelenggaraan Leipzig Book Fair. Media ini menulis alasan Indonesia terpilih sebagai tamu kehormatan Frankfurt Book Fair di antaranya karena Indonesia memiliki banyak penulis muda.**

kuliner dalam Frankfurt Book Fair 2015 mendatang.

Sebagai kantor berita Jerman, berita DPA pun resmi dikutip media lokal maupun media nasional di Jerman. Berdasarkan data yang diterima Komite Nasional Indonesia Program *Guest of Honour* Frankfurt Book Fair, setidaknya ada 16 media daring (*online*) yang memberitakan Indonesia. Media tersebut antara lain [www.boersenblatt.net](http://www.boersenblatt.net), [www.fnp.de](http://www.fnp.de), [www.welt.de](http://www.welt.de), [www.mittelhessen.de](http://www.mittelhessen.de), dan [www.sueddeutsche.de](http://www.sueddeutsche.de). Data tersebut belum termasuk media cetak dan elektronik seperti televisi dan radio.

Mirjam Flender dari Projekt2508, konsultan humas Indonesia di Jerman

mengatakan, ketertarikan media Jerman terhadap Indonesia sangat besar. Di Leipzig Book Fair, banyak wartawan yang hadir meliput Indonesia, termasuk dari media besar di Jerman, seperti Frankfurter Allgemeine Zeitung, Deutschlandradio, ZDF, ARD, dan BR.

Bahkan acara jamuan malam malam untuk penerbit dan media Jerman pun direspons dengan sangat baik.

"Saya mendapat tanggapan dari beberapa wartawan yang mengatakan bahwa itu adalah malam yang sangat menakjubkan dengan orang-orang yang menarik dan pembicaraan yang baik. Itu benar-benar sukses," katanya. (Desliana)

## Sambut HFN, 60 Mobil Bioskop Keliling ke Daerah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng insan perfilman menggalakkan kampanye “Ayo Nonton Film Indonesia” sebagai ajakan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film-film produksi anak bangsa. Kampanye ini sebagai bentuk peringatan Hari Film Nasional (HFN) yang jatuh setiap tanggal 30 Maret.

Selama dua minggu menjelang puncak peringatan HFN 30 Maret, sebanyak 60 mobil bioskop berkeliling ke daerah. Daerah yang disasar merupakan daerah yang belum memiliki bioskop. “Mobil tersebut sudah dicek kelayakannya dan film-filmnya sudah didigitalisasi,” kata Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman Kemendikbud, Endang Caturwati pada konferensi pers peringatan HFN di kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (12/3).

Endang mengatakan, pihaknya menyiapkan berbagai program untuk merayakan HFN tahun ini, mulai dari mengajak masyarakat untuk nonton ke bioskop, kampanye stop pembajakan, peningkatan sumber daya manusia perfilman, dan preservasi film. Program-program tersebut merupakan program yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.

Di kesempatan yang sama, Ketua Panitia HFN 2015 Lance Mengong mengatakan, bersamaan dengan program-program utama yang disiapkan untuk HFN, ada pula kampanye-kampanye yang didukung dengan video testimoni dan animasi. “Kalau video testimoni untuk menjangkau masyarakat, dan kampanye lewat animasi agar bisa lebih sampai ke anak-anak,” kata ketua panitia HFN Lance Mengong dalam kesempatan yang sama.

Untuk program-program yang disiapkan dalam memperingati HFN, panitia telah menunjuk orang-orang tertentu untuk menjadi penanggung jawab. Mulai dari kalangan sineas hingga aktris. Untuk program preservasi film, misalnya, aktris Wulan Guritno yang diberi kepercayaan.

30 Maret dipilih sebagai hari film nasional karena merupakan hari bersejarah bagi dunia perfilman nasional. Di tanggal tersebut pada 1950, adalah kali pertama sineas Indonesia berhasil membuat sebuah film berjudul “*Long March, Darah dan Doa*”.

(Aline)



Deretan mobil bioskop keliling yang akan memrayakan peringatan Hari Film Nasional (HFN) 2015. Sebanyak 60 mobil bioskop akan berkeliling daerah untuk menggalakkan kampanye “Ayo Nonton Film Indonesia”.

FOTO: laraapostonline.com/2014/11/kemendikbud-milki-60-mobil-bioskop

## Dua Perupa Indonesia Pamerkan Karyanya di Pameran “Merging Metaphors”



FOTO: DOK GNI

Dok. GNI

Duta Besar India untuk Indonesia, Gurjit Singh (kanan tengah) didampingi Kepala GNI, Tubagus Andre Sukmana (baju batik) mengamati dua lukisan hasil karya perupa Indonesia dalam pameran “Merging Metaphors”, Selasa (17/3).

Galeri Nasional Indonesia bekerja sama dengan Kedutaan Besar India menggelar Pameran “*Merging Metaphors: A Painting Exhibition of New Artworks*” pada 17-31 Maret 2015 di Gedung Galeri Nasional Indonesia (GNI). Dua perupa Indonesia ikut meramaikan pameran tersebut dengan menampilkan empat lukisan yang merupakan hasil program residensi di Darjeeling, India pada 2012 silam.

Mereka adalah seniman asal Yogyakarta, Pupuk Daru Purnomo dan Ivan Sagita. Selain kedua seniman tersebut, pameran yang merupakan rangkaian Festival of India 2015 itu juga melibatkan 23 perupa lainnya dari sembilan negara anggota ASEAN plus India, yang dikuratori oleh mantan Kepala Seni Budaya British Council India Sushma K Bahl.

Perupa tersebut antara lain Dr. Hj. Zakaria bin HJ. Hamid dan Osman Mohammad (Brunei Darussalam), Em Riem dan Sareth Svay (Kamboja), seniman Quek Kiat Sing (Singapura), Nataphon Na Nakorn dan Thawul Praman (Thailand), Dao Hai Phong dan Ngo Van Sac (Vietnam), Nivong Sengsakoun dan Saykham Oudomsouk (Laos), Datok S.K. Chou dan Sam Karuna (Malaysia), dan Min Wae Aung dan Zaw Mong (Myanmar).

Kepala Galeri Nasional Indonesia, Tubagus Andre Sukmana mengatakan, pameran ini memperlihatkan bagaimana lukisan dan karya seni lainnya menampilkan budaya negara masing-masing. “Dan itu mempengaruhi mereka saat residensi,” katanya dalam acara pembukaan di Ruang Serba Guna Galeri Nasional Indonesia, Selasa (17/3).

Pembukaan pameran juga dihadiri Duta Besar India untuk Indonesia, Gurjit Singh. Gurjit mengatakan, lukisan-lukisan yang dipamerkan menggambarkan keragaman seni kontemporer dari wilayah India yang terkenal dengan keindahan bukitnya. “Saya berharap kerja sama dan program residensi dari India kepada seniman Indonesia atau ASEAN di kemudian hari bisa berjalan lancar,” katanya. (Desliana)



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan menerima 20 pelajar asal Jepang yang berkunjung ke Indonesia sebagai ASEAN Teenage Ambassador, Selasa (17/3).

## Mendikbud Terima Kedatangan 20 Pelajar Jepang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, beserta jajarannya menerima 20 pelajar Jepang sebagai ASEAN Teenage Ambassadors dalam kunjungannya ke kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Selasa (17/3). Dalam sambutannya, Mendikbud mengajak para pelajar tersebut untuk berbagi pengalaman ketika mengunjungi Indonesia kepada keluarga, sahabat, dan teman-temannya setelah kembali ke Jepang nanti serta tidak menutup kemungkinan untuk berbagi pengalaman kepada teman-temannya di Indonesia.

Mendikbud menyerukan agar ketika datang ke sebuah tempat membawa sebuah pesan dan saat kembali ke tempat asal pun membawa pesan yang lainnya. Hal ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk diplomasi. "Bagikan pengalaman dan buat temanmu serta temanmu yang lebih muda agar mau menjadi sepertimu. Cerita dan pengalamanmu akan memberikan inspirasi bagi banyak orang," katanya.

Mendikbud mengatakan, menghabiskan waktu di Indonesia adalah sebuah pengalaman. Mendikbud percaya bahwa pengalaman berada di Indonesia ini tidak akan terlupakan oleh para pelajar Jepang. "Saya berharap suatu hari kita bertemu kembali dan Anda akan mengatakan, 'Saya pernah bertemu dengan Bapak di Kementerian Pendidikan tahun 2015'," ujarnya.

Kunjungan 20 pelajar Jepang ke Indonesia tersebut merupakan salah satu program pertukaran budaya yang diusung oleh Aeon 1% Club Foundation sebagai salah satu program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibilities*). Mendikbud menyampaikan, atas nama pemerintah Indonesia pihaknya mengapresiasi program ini dan berharap ada keberlanjutan di tahun-tahun mendatang. Program ini, kata dia, merupakan kelanjutan dalam proses penguatan hubungan antara kedua negara. "Saya berharap para pelajar yang berpartisipasi dalam program ini pun mendapatkan keuntungan yang banyak," tuturnya. (Agi)

## PAUD, Landasan Utama Tapaki Jenjang Kehidupan Berikutnya

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak hanya sekadar persiapan masuk jenjang pendidikan dasar. Menurut Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Netty Herawati, PAUD merupakan landasan utama setiap anak Indonesia menapaki jenjang kehidupan. Usia dini adalah masa keemasan, mengingat pada usia 4 tahun kapasitas kecerdasan anak telah mencapai 50 persen dari kecerdasan orang dewasa. Kapasitas kecerdasan ini terus berkembang hingga mencapai 80 persen di usia 8 tahun.

"Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan komprehensif pada usia dini dapat bersifat permanen yang sulit diperbaiki setelah masa tersebut terlampaui. PAUD gerbang dan pondasi penting dalam Gerakan Revolusi Mental bangsa ini," katanya dalam seminar bertajuk "Substansi, Tinjauan, dan Implementasi Kurikulum 2013 PAUD". Seminar berlangsung di Malang, Jawa Timur, Sabtu (14/3). Netty menambahkan, karenanya penting untuk menjaga dan menjamin mutu setiap pendidik PAUD.

Dalam seminar yang diikuti hampir 7.000 pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dari berbagai daerah itu, dilakukan pula peluncuran portal HIMPAUDI sebagai wadah komunikasi, berbagi informasi dan media belajar semua Guru PAUD. Peluncuran dilakukan oleh Plt. Direktur Jenderal PAUDNI, Taufik Hanafi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan yang berhalangan hadir dalam acara tersebut tetap menyampaikan pesannya melalui video. "Saya percaya, kegiatan yang melibatkan lebih dari 6.700 guru dan tenaga kependidikan anak usia dini dari seluruh Indonesia ini, merupakan ajang yang sangat bermanfaat untuk mengantisipasi perubahan dan memastikan bahwa kualitas pendidikan anak-anak di PAUD-PAUD kita berjalan dengan baik. Saya sampaikan apresiasi atas terselenggaranya seminar ini," katanya. (Teguh, Ratih)



Siswa PAUD Mekar Asih terlihat beraktivitas di ruang Perpustakaan Kemendikbud. Pendidikan anak usia dini penting karena merupakan landasan utama anak dalam menapaki jenjang kehidupan di masa depan.

## Ibu Negara, Iriana Joko Widodo Dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Indonesia

Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Indonesia. Pengukuhan berlangsung dalam acara Gebyar PAUD 2015 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (19/3). Dalam pengukuhan tersebut, Ibu Negara meminta Bunda PAUD se-Indonesia yang hadir untuk terus beraksi dan gencar dalam menyosialisasikan pendidikan anak usia dini di wilayahnya masing-masing.

Ia juga mengatakan, pengukuhan kali ini adalah kali ketiga dirinya menjadi Bunda PAUD. Dirinya menjadi Bunda PAUD pertama kali saat Presiden Joko Widodo masih menjadi Wali Kota Solo. Kemudian kedua kalinya saat Presiden Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pengukuhan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sebagai Bunda PAUD Indonesia diawali dengan pertanyaan dari dua anak yang maju ke atas panggung. Salah satunya adalah Keisha Nadhira, dari lembaga PAUD Mekar Asih Kemendikbud, yang mengenakan pakaian adat Aceh.

Keduanya menanyakan kesediaan Ibu Negara menjadi Bunda PAUD Indonesia. "Bersediakah Ibu Negara Iriana Joko Widodo menjadi BUNDA PAUD Indonesia untuk kami?" tanya mereka. "Ya, saya bersedia, anakku sayang," jawab Ibu Negara.

Melihat anak-anak itu, terutama saat mereka menari Kuda Lumping menyambut kedatangannya, Ibu Negara mengatakan ia menjadi terkenang akan masa kecilnya. Saat masih kecil ia juga sempat berpentas menampilkan tarian Kuda Lumping.

Selain pengukuhan Ibu Negara sebagai Bunda PAUD Indonesia, Gebyar PAUD 2015 juga meliputi Rakornas Bunda PAUD se-Indonesia. Dalam pidato singkatnya yang sekaligus membuka Rakornas Bunda PAUD se-Indonesia 2015, Ibu Negara berharap para Bunda PAUD tidak berhenti di Rakornas, melainkan bisa terus aktif dan menyosialisasikan pentingnya PAUD di daerahnya masing-masing. **(Desliana)**



Ibu Negara, Iriana Joko Widodo didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan menerima pertanyaan dari dua anak PAUD tentang kesediaannya dikukuhkan sebagai Bunda PAUD Indonesia. Pengukuhan dilakukan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Kamis (19/3).

FOTO: RIDWAN PFI

## Mei 2015, Satuan Pendidikan Kerjasama Tingkat PAUD Jalani Akreditasi

Mei 2015 mendatang, setiap satuan pendidikan kerjasama (SPK) tingkat PAUD akan menjalani akreditasi untuk dinilai kelayakannya. Sebelum memulai proses ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) melakukan sosialisasi proses akreditasi kepada seluruh SPK tingkat PAUD. Sampai saat ini telah terdapat 126 SPK yang tercatat resmi di Ditjen PAUDNI.

Ketua Umum Pengurus Pusat HIMPAUDI yang juga merangkap anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF), Netti Herawati mengatakan, sosialisasi dilakukan untuk menyerap masukan dari para pengelola SPK tingkat PAUD mengenai instrumen penilaian akreditasi. Untuk itu timnya melakukan studi pendahuluan dalam upaya menyusun instrumen penilaian akreditasi. Studi pendahuluan pertama kali dilakukan pada Kamis (12/3) terhadap salah satu SPK di Surabaya, Jawa Timur.

"Saya mengapresiasi pemikiran Ibu Ella Yulaelawati (Sekretaris Ditjen PAUDNI Kemendikbud) bahwa sebelum menyusun instrument penilaian akreditasi perlu membaca kondisi yang ada di lapangan," katanya.

Netty menambahkan, sekolah yang dikelola asing juga berperan untuk ikut mencerdaskan bangsa Indonesia. "Kami akui, sekolah yang dikelola pihak asing bertujuan mencerdaskan bangsa Indonesia yang menjadi siswanya, tapi karena beroperasi di wilayah Indonesia, juga harus patuh pada aturan yang berlaku di sini," jelasnya.

Anggota BAN-PNF lainnya, Yatim Riyanto mengatakan, ada delapan komponen penilaian akreditasi. "Hasilnya akan dilakukan pengategorian SPK, apakah grade A, B, atau C," kata Yatim. **(Yanuar)**

## UNESCO Tetapkan Kota Pekalongan Jadi Anggota Jaringan Kota Kreatif

Prestasi membanggakan berhasil diraih Kota Pekalongan. Pada 1 Desember 2014 lalu, kota yang terkenal dengan industri batiknya ini ditetapkan UNESCO sebagai anggota baru Creative Cities Network (CCN) atau jaringan kota kreatif bersama 27 kota lainnya dari 19 negara di dunia. Pemerintah Kota Pekalongan rencananya akan merayakan penetapan tersebut pada 1 April 2015 mendatang yang bertepatan dengan puncak perayaan hari ulang tahun ke 109.

Kota Pekalongan menjadi jaringan kota kreatif di dunia untuk kategori craft and folk art atau kerajinan dan seni rakyat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan, Kementerian Pariwisata, dan kementerian terkait lainnya untuk berkomitmen dalam memenuhi visi, misi, dan program kegiatan yang tertuang dalam dossier yang dikirimkan ke UNESCO. Salah satu komitmen tersebut adalah menjaga dan melestarikan tradisi Batik sebagai potensi kesenian, kerajinan, dan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan.

Seperti dikutip pada siaran pers UNESCO, Direktur Jenderal UNESCO, Irina Bokova mengatakan, UNESCO Creative Cities Networks adalah alat yang luar biasa untuk bekerja sama. "Hal ini mencerminkan komitmen kami untuk mendukung potensi kreatif dan inovatif yang luar biasa untuk memperluas jalan pembangunan berkelanjutan," katanya.

Jaringan kota kreatif bertujuan mendorong kerjasama internasional antar negara anggota jaringan dengan memanfaatkan kreativitas sebagai penggerak pembangunan kota berkelanjutan, inklusi sosial dan meningkatkan pengaruh kebudayaan. Program ini pertama kali digelar sejak 2004 dan sampai saat ini terdapat 69 kota kreatif di berbagai penjuru dunia yang menjadi bagian dari UNESCO CNN dengan berbagai kategori. Kategori-kategori tersebut adalah kerajinan dan seni rakyat; desain; film; seni memasak; kesusastraan; seni media; dan musik. **(Agi)**



## “MEMPERKUAT PELAKU DAN EKOSISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BERKARAKTER DILANDASI SEMANGAT GOTONG ROYONG”



**Barnabas Dowansiba**  
(Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Kabupaten Manokwari, Papua)

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2015 merupakan tahun ke lima yang saya ikuti, penyelenggaraan rembuk ini menurut saya merupakan hal yang sangat luar biasa dan bagus sekali. Karena dengan adanya kegiatan ini, kami di daerah bisa mendapatkan informasi tentang program-program baru nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kami berharap melalui kegiatan ini, dapat bersinergi dengan program-program yang akan diselenggarakan oleh kementerian dan daerah lainnya.

Tema RNPK “Memperkuat Pelaku dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Dilandasi Semangat Gotong Royong” ini saya sangat setuju, karena mengedepankan dan memperkuat pelaku pendidikan dan kebudayaan dalam melakukan pengembangan pendidikan karakter. Ini menjadi ide yang sangat luar biasa, tema itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan bagi dunia pendidikan dan kebudayaan saat ini. Sehingga kita dapat memperkuat jati diri sebagai pelaku pendidikan. Pendalaman materi yang mengarah kesana justru harus diperkuat, agar para penyelenggara pendidikan dan kebudayaan merasa mendapat apresiasi dan semakin semangat.

Kondisi pendidikan di Kabupaten Manokwari sudah cukup luar biasa perkembangannya, khusus untuk aksesnya kami sudah hampir dapat mencukupi dan menjangkau semua anak-anak di Manokwari. Hal yang menjadi persoalan saat ini adalah masalah kekurangan guru saja. Namun kami bersyukur, dengan adanya program SM3T yang mengirimkan guru-guru ke daerah kami.

Dalam penyelenggaraan RNPK ini saya berharap, dapat mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, agar diadakan pengangkatan khusus untuk daerah-daerah pedalaman seperti Manokwari ini, sehingga kebutuhan akan guru dapat terpenuhi.

Persiapan ujian nasional (UN) di Kabupaten Manokwari sudah dipastikan siap 80 persen. Kebijakan baru Kemendikbud menghapus UN sebagai syarat kelulusan merupakan suatu keputusan yang bijaksana dan bagus. Dengan begitu kita dapat mengetahui mutu-mutu dari siswa dan siswi kita setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kebijakan ini sangat menyentuh kami yang berada di daerah.

Dengan kebijakan baru tentang UN ini kita dapat memantau ujian sebagai pemetaan mutu pendidikan, sehingga kita dapat melihat kekurangan dan kelebihan dari pendidikan yang ada di Kabupaten Manokwari. Kita akan meningkatkan kembali kelemahan-kelemahan dari penyelenggaraan pendidikan di daerah kami, sehingga standarisasi di daerah kami bisa sama dan setara dengan daerah-daerah lain yang sudah maju.



**H. Istiqlal**  
(Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu)

Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) merupakan sekolah yang langsung berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keberadaan sekolah disini agak berbeda karena sebagian besar orang tua siswa bekerja sebagai buruh migran Indonesia, yang kebanyak tersebar di seluruh Sabah, bahkan sampai Serawak. Kami merupakan induk dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau Community Learning Center (CLC) yang ada di Sabah dan Serawak. Jumlah siswanya sekitar 724 orang yang ada di sekolah

induk, dan yang ada di seluruh CLC jika di gabungan sekitar 29 ribu orang.

Kami merupakan sekolah satu atap. Di tempat kami ada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta ada juga jenjang pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C. Kedepan direncanakan akan dibuka universitas terbuka. Semua jenjang pendidikan itu akan menginduk ke sekolah kami. Siswa yang terdapat di SIKK ini sekitar 30 persen siswanya belum memiliki dokumen seperti paspor. Ini menjadi tugas kami untuk memberikan dokumen kepada mereka.

Tema RNPK Tahun 2015 “Memperkuat Pelaku dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Dilandasi Semangat Gotong Royong” ini sangat tepat, karena karakter menjadi kunci dalam pendidikan. Karakter Ke-Indonesiaan inilah yang harus ditumbuhkan di daerah seperti kami, khususnya kepada anak-anak buruh migran. Mereka merupakan anak yang lahir dan besar di luar Negara Republik Indonesia. Untuk itu karakter kebangsaan ini perlu kita tanamkan kepada mereka sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme sebagai warga negara Indonesia. Kita berada disana sebagai representasi negara.

Bagaimana kita menggalakkan lagu kebangsaan setiap hari Senin, dan kita pun juga menggalakan lagu-lagu nasional kepada mereka sehingga tumbuh rasa cinta tanah air. Kalau kita tidak kenalkan rasa nasionalisme kepada mereka, hal terburuk adalah mereka tidak mengenal Indonesia. Untuk itu kami berusaha untuk selalu memperkenalkan dan membentuk karakter cinta terhadap Indonesia kepada para siswa tersebut.

Alhamdulillah para guru yang terdapat di sekolah kami memiliki dedikasi yang sangat tinggi. Perjuangan guru-guru CLC sangat tinggi, mereka harus menyeberang sungai, mengetuk pintu rumah-rumah buruh migran agar mau menyekolahkan anaknya.

Melalui RNPK ini saya ingin sekali adanya masukan-masukan praktek-praktek terbaik dari penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dengan begitu kami dapat membuat perencanaan-perencanaan yang terbaik untuk keberlangsungan SIKK, sehingga dapat melakukan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Kami juga berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan dokumen bagi siswa-siswa SIKK yang belum berdokumen.

Kebijakan-kebijakan yang ada di RNPK ini akan menjadi hal yang berharga bagi kami, sehingga dapat kami bawa ke sekolah untuk memberikan penguatan bagi para guru dan siswa di SIKK, penguatan-penguatan seperti ini yang sangat kami perlukan.



**Siswandari**  
(Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Indonesia)

Penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun ini sungguh luar biasa, karena mengikutsertakan pihak swasta. Saya kira ke depan harus lebih banyak lagi swasta diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan kebudayaan, karena bagaimana pun, kalau kita berbicara tentang pendidikan pihak swasta ikut berkontribusi.

Yayasan Al-hikmah ini merupakan lembaga penyiapan calon kepala sekolah. Mereka mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk diberikan ke sekolah swasta lainnya. Saat ini pengurus Muhammadiyah DI Yogyakarta sudah mulai menggerakkan pelatihan kepala sekolah.

Saya berharap pada saat penyelenggaraan RNPK di sidang komisi, kami bisa menyuarakan tentang persiapan bagi calon kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan pendidikan swasta. Saya juga berharap pada kepala dinas pendidikan di kabupaten/kota dapat merangkul teman-teman swasta. Dengan begitu pemerintah dapat melihat pendidikan secara makro, sehingga kalau kita berbicara tentang pendidikan, maka seluruh yang bergerak dibidang pendidikan dapat berjalan kearah satu titik.

Kepada para kepala sekolah saya berpesan, jangan segan-segan mensupervisi guru pada saat mengajar, karena hanya kepala sekolah yang bisa menjamin guru-gurunya dalam memberikan inspirasi dan menghasilkan siswa yang berkualitas. **(Seno Hartono)**



# “MEMPERKUAT PELAKU DAN EKOSISTEM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BERKARAKTER DILANDASI SEMANGAT GOTONG ROYONG”



Rangkain persiapan dan kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPk) 2015, 29-31 Maret di Pusbangtendik, Depok, Jawa Barat. (Foto-foto: Ridwan M/Jilan/Aline/Dian S)